

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Corporate Social Responsibility* (CSR) serta laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) sudah menjadi isu utama dalam pertumbuhan proses bisnis industri. Dunia usaha menghadapi tekanan luar biasa dari berbagai pemangku kepentingan untuk menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab (Susanto and Tarigan 2013). Idealnya, perusahaan diharapkan dapat menyebarluaskan informasi terkait dampak operasionalnya terhadap lingkungan terutama perubahan iklim kepada publik karena perusahaan dapat menjadi penyebab sekaligus solusi untuk perubahan iklim dan kegiatan berbahaya lingkungan lainnya. Tuntutan untuk meningkatkan transparansi mengenai masalah lingkungan telah menjadi isu kritis sejalan dengan meluasnya dampak perubahan iklim dari hari ke hari. Untuk lebih spesifik, transparansi informasi untuk isu-isu lingkungan telah menjadi krusial bagi pemangku kepentingan terutama investor terkait rasionalisasi harapan mereka terhadap tanggung jawab lingkungan perusahaan (Akuntansi et al. 2024).

La Nina merupakan salah bentuk anomali iklim yang bisa menyebabkan cuaca ekstrim (BMKG 2021). La Nina ditandai dengan penurunan suhu permukaan laut (SPL) Samudera Pasifik di bagian ekuator lebih dari 0,5 derajat celcius. Ketika La Nina terjadi, suhu permukaan laut (SPL) di Samudera Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan di bawah kondisi normalnya. Pendinginan SPL ini mengurangi potensi pertumbuhan awan di Samudera Pasifik bagian tengah meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum (Suhadi, 2015). Saat terjadi La Nina dapat menyebabkan musim hujan berkepanjangan dan menyebabkan variabilitas curah hujan (Hidayat, Juniarti, and Ma'Rufah 2018). Menurut (Yuniasih, Harahap, and Wardana 2023), menjelaskan bahwa dalam jangka waktu tahun 2013-2022, Indonesia mengalami beberapa kali kejadian anomali iklim. Kondisi iklim normal terjadi pada tahun 2013, 2016, 2017, 2018. El Nino terjadi pada pertengahan tahun 2014 dan 2015 dengan kekuatan El Nino kuat

dan 2019 dengan kekuatan El Nino lemah, sedangkan pada pertengahan 2020, 2021, dan 2022 mengalami kondisi La Nina lemah-sedang.

Dilansir dari ([idxchannel.com](http://idxchannel.com) 2023), bahwa di Indonesia mengalami peristiwa iklim yaitu El Nino yang merupakan sebuah peristiwa naiknya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur dekat garis khatulistiwa. Kenaikan suhu telah mencapai setengah derajat celcius hingga satu derajat celcius dibanding suhu normalnya. Hal ini dapat menyebabkan perubahan pola cuaca global dengan dampak pada curah hujan, suhu udara, dan kondisi cuaca di berbagai wilayah Indonesia. Peristiwa ini biasanya terjadi 1 kali dalam 5 tahun, perusahaan yang cukup berdampak dengan adanya fenomena ini yaitu perusahaan pada sektor pertambangan.

Pada saat terjadinya peristiwa El Nino ini, perusahaan pertambangan dapat menghadapi sejumlah tantangan yang berasal dari perubahan cuaca yang secara signifikan seperti yang pertama, pola curah hujan yang tidak menentu dengan ciri adanya kekeringan di beberapa wilayah. Kekeringan ini menyebabkan ketersediaan air di sekitar lokasi pertambangan berkurang signifikan, sedangkan air diperlukan dalam jumlah besar untuk kegiatan pertambangan seperti pengolahan bijih dan pendingin mesin. Kedua, peristiwa El Nino juga memicu cuaca ekstrem seperti gelombang panas, badai dan angin kencang, hal ini membahayakan kondisi bagi para pekerja dan peralatan di lokasi tambang. Cuaca ekstrem juga berpotensi merusak infrastruktur dan transportasi yang menghambat distribusi bahan baku maupun pengiriman hasil tambang ke pelanggan. Ketiga, gangguan operasional dan distribusi otomatis akan menekan volume produksi dan penjualan pertambangan serta pendapatan perusahaan berpotensi anjlok. Rendahnya produksi dan pendapatan tentu akan berdampak menurunkan laba bahkan kerugian bagi perusahaan jika berlarut-larut, hal ini akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan tambang secara signifikan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerapkan kewajiban kepada industri pertambangan batubara dan mineral untuk memasang peralatan pemantauan sparing di semua titik penaan ([impactlabs.id](http://impactlabs.id) 2023). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 tahun 2021 tentang Tata Cara Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pencemaran Lingkungan. KLHK memiliki peran dalam memantau dampak perubahan iklim, termasuk fenomena El Nino. Beberapa hal yang dilakukan KLHK terkait hal tersebut seperti pemantauan dan peringatan dini terhadap potensi terjadinya El Nino dan La Nina yang ekstrim, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak kelangkaan air akibat El Nino pada berbagai sektor termasuk pertambangan, pengelolaan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor akibat curah hujan, dan penyusunan kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Banyak perusahaan di Indonesia saat ini hanya berfokus pada laba atau keuntungan jangka pendek alih-alih pertumbuhan jangka panjang (Septiani 2023). Perusahaan yang sudah berkembang serta hanya memfokuskan pada pencapaian keuntungan sehingga tidak memperhatikan dampak dari kegiatan bisnisnya. Beberapa peraturan pemerintah, seperti UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, UU No. 40 pasal 66 ayat 2 dan UU No. 74 tahun 2007, tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, mendukung pengungkapan laporan keberlanjutan. Laporan keuangan perusahaan juga harus menggambarkan aktivitas dan biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas sosial, seperti yang telah ditetapkan oleh ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan melalui No.Ke134/BL/2006. Selain itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 mengenai tanggung jawab atas laporan keuangan, paragraf 9 (sembilan), secara implisit merekomendasikan pengungkapan masalah lingkungan dan sosial dalam *sustainability reporting* dan laporan nilai tambah.

*Sustainability reporting* menjadi salah satu wujud bentuk pertanggungjawaban perusahaan terkait komitmennya. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (ojk.go.id 2017) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, *Sustainability Report* dapat menjadi strategi perusahaan sebagai media untuk menyajikan informasi kontribusinya terhadap SDGs. Indonesia termasuk

salah satu negara yang berkomitmen untuk mengimplementasikan SDGs, di Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2021). Pada tahun 2022 berdasarkan SDG index, Indonesia berada di peringkat 82 dari 163 negara dengan skor 69,16. Skor tersebut mengukur kemajuan total dari sebuah negara dalam menuju pencapaian seluruh tujuan SDGs. Dengan cara mengimplementasikan 17 tujuan SDGs, pelaku usaha telah menjalankan kewajibannya untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan dengan memperhatikan aspek tata kelola perusahaan yang berkelanjutan, sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan SDGs dalam bisnis, perusahaan akan memperoleh beberapa manfaat eksternal bagi perusahaan, yaitu meningkatkan citra perusahaan, reputasi, kepercayaan masyarakat, dan minat investor (Arifianti and Widianingsih 2022).

Namun masih banyak perusahaan yang memiliki kasus 4 pilar SDGs salah satunya pada perusahaan sektor pertambangan. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melaporkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 terdapat 116 konflik pertambangan yaitu terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan, kasus perampasan lahan, kasus kriminalisasi warga serta kasus pemutusan hubungan kerja (Arifianti and Widianingsih 2022);(jatam.org 2020). Perusahaan sektor pertambangan sebuah perusahaan yang sebagian kegiatan operasional bisnisnya berhubungan dengan sumber daya alam. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan dampak dari kegiatan operasional atau aktivitas yang secara langsung berdampak pada 4 pilar SDGs. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs serta mengimplementasikan tujuan SDGs pada aktivitas operasional perusahaan atau pada program CSRnya. Perusahaan yang secara terbuka dan transparansi menyajikan informasi penting pada laporan keberlanjutan dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan (Triyani, Setyahuni, and Kiryanto 2020).

Sejak diterbitkannya POJK tersebut, penyusunan *sustainability report* berubah sifat yang awalnya dari sukarela menjadi wajib sesuai pada Bab IV pasal

10 ayat (1). Pemberlakuan peraturan tersebut dilakukan secara bertahap yang diatur pada pasal 3 dengan tahun mulai berlaku yang berbeda-beda sesuai dengan sektor perusahaannya. Sektor perbankan menjadi pelaksana pertama pada tahun 2019, sedangkan untuk perusahaan publik berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020. Namun, OJK mempertimbangkan kondisi covid-19 di tahun 2020 sehingga memberikan relaksasi mengenai batas waktu penyampaian Laporan Keberlanjutan pertama perusahaan publik maksimal hingga tahun 2022. Hadirnya POJK ini serta diiringi tren pengungkapan informasi berkelanjutan memberikan dampak baik pada meningkatnya perusahaan yang menerbitkan *sustainability report* yaitu tahun 2016 sebanyak 55, tahun 2019 sebanyak 100, dan di tahun 2020 sebanyak 154 (Aditya 2022);(pwc.com 2023).

Laporan non keuangan dapat menjadi tolak ukur keberlangsungan dari suatu perusahaan, sehingga laporan tersebut sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan para pemangku kepentingan. Rasa percaya ini dapat mendorong para pemangku kepentingan untuk berinvestasi dan berkolaborasi sehingga dapat menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang baik (Masket 2018). Perusahaan yang telah melaporkan SDGs dapat menunjang kinerja keuangan di masa depan, karena perusahaan telah berkontribusi dan bertanggung jawab terhadap sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum serta tata kelola yang baik di sekitar perusahaan yang dimana tanggung jawab perusahaan akan menghasilkan dampak yang baik seperti, dikenal oleh masyarakat sebagai perusahaan sekaligus pelaku usaha yang baik.

Penelitian (Nabila 2021) kinerja perusahaan terhadap keberlanjutan dapat memberikan kabar baik bagi pelaku usaha. Sehingga, pelaporan sustainability report dan keberlanjutan dari sebuah usaha memiliki pengaruh pada kinerja keuangan perusahaan. Hubungan antara SDGs dengan kinerja keuangan telah dibuktikan pada penelitian Alfiah & Arsaj (2021) bahwa hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif pengungkapan perusahaan terkait SDGs terhadap profitabilitas. Namun, setiap perusahaan memiliki gaya dan bentuk penyajian masing-masing dalam melaporkan kontribusi terkait SDGs pada *sustainability report* nya. Bentuk penyajiannya antara lain hanya untuk menyatakan bahwa

perusahaan berupaya mendukung SDGs, dengan cara menyajikannya secara jelas mengenai kegiatan CSR, dan ada juga yang melengkapi penjelasannya dengan data dalam bentuk angka terukur. Dengan demikian, kualitas dari pelaporan kontribusi SDGs berbeda-beda.

Penelitian ini merupakan replikasi dari (Arifianti and Widianingsih 2022) tentang Kualitas Pengungkapan *Sustainable Development Goals* (SDGS) dan Kinerja Keuangan : Bukti Empiris atas Perusahaan Pertambangan di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang direplikasikan dengan menambahkan variabel independen yaitu Pengungkapan *Sustainability Reporting*. Selain itu, penelitian ini memberikan kebaruan pengujian mengenai topik **“Pengaruh Pengungkapan Sustainability Reporting dan Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals”** dalam lingkup perusahaan pertambangan yang disesuaikan dengan fenomena yang telah dilansir di Bursa Efek Indonesia mengenai peristiwa El Nino.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pengungkapan *Sustainability Report* (SR) berpengaruh terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) ?
2. Apakah kinerja keuangan perusahaan berpengaruh terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis serta membuktikan secara empiris pengungkapan *Sustainability Reporting* berpengaruh terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).
2. Untuk menganalisis serta membuktikan secara empiris kinerja keuangan berpengaruh terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pentingnya dan keuntungan yang mungkin ditimbulkan dari pengungkapan *Sustainability Reporting* dan Kinerja Keuangan Perusahaan secara jelas agar dapat tercapainya pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam jangka waktu panjang pada perusahaan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi karena dapat memberikan informasi dan pengetahuan bahwa pentingnya Pengungkapan *Sustainability Reporting* dan Kinerja Keuangan sehingga dapat tercapainya pembangunan berkelanjutan.

